

**PRINSIP DASAR AKHLAK TERHADAP PEMBANGUNAN  
EKONOMI DALAM ISLAM**

**AISYA HUMAIRA**

Universitas Lambung Mangkurat  
Email : 2310311120014@mhs.ulm.ac.id

**MARISA TRI SETIA**

Universitas Lambung Mangkurat  
Email : 2310311120010@mhs.ulm.ac.id

**NAJWA AZIZAH**

Universitas Lambung Mangkurat  
Email : 2310311220052@mhs.ulm.ac.id

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

**ABSTRACT**

The basic principle of morals in Islamic economic development itself is reflected in the economic concept of iktishad which means seriousness in the sense of providing opportunities for the development of Islamic thought in sustainable economic development. Islamic economic development is very important in establishing Islamic morals and values as the goal of economic education. Economic development involves economic growth through social cooperation to produce economic development based on moral principles consistent with Islam. According to Yusuf, the goal of economic development in Islam is a good life (al-hayat), as stated in the Qur'an, "Waman Yamar Salihan Min Zakarin Aw Unsha Faranuhaynu Hayatan Tayyiba." •At-Taiyiba). The majority of Islamic economic writers understand the concept of economic development from some verses of the Quran, such as: "Huwallazî ansya'akum fi al-ard wasta'marakum fiha" (Q.S. Hud, 61). This verse has two meanings related to economic development. First is the importance of al-Ujub, or the obligation of mankind to preserve the earth for agriculture and development. Second, this verse contains God's command to mankind to develop the universe. God's command is binding and absolute. The majority of authors argue that the word al-imarah (prosperity) is the same as the word atanmiyya al-iktisadiya (economic development).

**Keywords: Moral basis of Islamic economic development**

## ABSTRAK

Prinsip dasar akhlak dalam pembangunan ekonomi Islam sendiri tercermin dalam konsep ekonomi iktishad yang berarti keseriusan dalam arti memberikan peluang bagi pengembangan pemikiran Islam dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pengembangan ekonomi Islam sangat penting dalam menetapkan moral dan nilai-nilai Islam sebagai tujuan pendidikan ekonomi. Pembangunan ekonomi melibatkan pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama sosial untuk menghasilkan pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip moral yang konsisten dengan Islam. Menurut Yusuf, tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah kehidupan yang baik (al-hayat), sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, "Waman Yamar Salihan Min Zakarin Aw Unsha Faranuhaynu Hayatan Tayyiba." (At-Taiyiba). Mayoritas penulis ekonomi Islam memahami konsep pembangunan ekonomi dari beberapa ayat Al-Quran, seperti: "Huwallazî ansya'akum fi al-ard wasta'marakum fiha" (Q.S. Hud, 61). Ayat ini mempunyai dua arti terkait dengan pembangunan ekonomi. Pertama adalah pentingnya al-Ujub, atau kewajiban umat manusia untuk menjaga bumi untuk pertanian dan pembangunan. Kedua, ayat ini berisi perintah Allah kepada umat manusia untuk membangun alam semesta. Perintah Tuhan bersifat mengikat dan mutlak. Mayoritas penulis berpendapat bahwa kata al-imarah (kemakmuran) sama dengan kata atanmiyya al-iktisadiya (pembangunan ekonomi).

**Kata Kunci : Dasar akhlak pembangunan ekonomi islam**

## LATAR BELAKANG

Krisis ekonomi merupakan krisis yang paling banyak dirasakan bagi masyarakat. Salah satu penyebabnya dari krisis ekonomi dilihat langsung keperluan dasar mereka baik pada aspek biologis maupun sosiologis masyarakat. Masih banyaknya pembangunan ekonomi secara tidak merata baik di kota maupun desa. Akibatnya ada beberapa orang yang hidup dalam berkelimpahan harta. Sementara sebagian besar masyarakat hidup dalam keadaan memperhatikan, mereka tidak mampu memenuhi hajat hidup sehari-hari bahkan mereka tidak memiliki tempat tinggal. Target pertumbuhan ekonomi untuk kepentingan persaingan perseorangan, bukan mewujudkan kesejahteraan bersama dan kerjasama sosial. Pembangunan ekonomi yang disertai dengan perubahan sosial budaya akan banyak menimbulkan masalah moral bagi masyarakat, oleh

karena itu alternatif yang dapat dilakukan oleh ekonomi agar bisa memperhatikan aspek moral dengan cara mengkaitkan pembangunan ekonomi dengan agama.

Tentu saja moralitas menjadi landasan bagi tumbuh suburnya pembangunan ekonomi Islam. Kajian ilmu ekonomi pada dasarnya berkaitan dengan perilaku manusia sebagai konsumen, pedagang, dan produsen melalui aspek utama perilaku manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perilaku manusia perlu dikaji melalui filsafat dan sikap masyarakat terhadap kehidupan. Ternyata perjalanan panjang perekonomian konvensional hanya membawa masyarakat pada situasi yang sangat tidak stabil. Keadaan ini disebabkan oleh sistem perekonomian kita yang mengabdikan pada budaya luar dan bukan kepada Allah SWT. Ketakutan akan ketidakadilan mendorong masyarakat untuk hidup dalam konflik dan saling bersaing untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Sebaliknya perekonomian yang berbasis Islam mendorong manusia untuk mengabdikan kepada Allah SWT berdasarkan keimanan dan ketakwaan, sehingga menjadi tenang dan harmonis. Dari sini tujuan pembangunan ekonomi Islam adalah an-nafs al-Musmainna, atau ketenangan menuju akhlak (QS. 89: 27-30).

Diharapkan kita memiliki sikap iman dan takwa agar tercapai pembangunan ekonomi Islam baik bagi negara maupun kita. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembangunan ekonomi Islam yang sejahtera tanpa ada rasa ketidakadilan sesama umat manusia, Tidak ada rasa iri dengki, Tidak ada rasa saling menjatuhkan satu sama lain bahkan menindas orang yang lemah.

## **KAJIAN TEORITIS**

Pembangunan ekonomi<sup>1</sup> menurut kebanyakan teorikus ekonomi Islam bersifat komprehensif, tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata, akan tetapi seperti ditegaskan oleh Khursyid meliputi aspek moral dan sosial-material dan spritual. Di samping itu kata Khursyid pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari keadilan distribusi pendapatan kekayaan bagi setiap individu pada seluruh generasi, menghapus riba dan mewajibkan zakat.

Pendapat lain menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan akidah dan membenarkan iman. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara konsep pertumbuhan ekonomi

menurut Islam dengan kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi Islami - menurut pandangan Khursyid- berasaskan filsafat yang berhubungan dengan al-tauhid, al-rububiyah dan al-istikhlaf. Namun menurut Al-Fasi perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh sistem kapitalisme yang membolehkan riba dan sistem sosialisme yang tidak terikat dengan agama.

Prinsip prinsip ekonomi islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : tauhid (keimanan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma’ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Nilai tersebut menjadikan nilai ekonomi islam untuk membangun konsep akhlak agar tercapainya pembangunan ekonomi islam yang berakhlak. Akhlak inilah menjadi para pelaku ekonomi dan bisnis untuk melakukan aktivitasnya agar terciptanya pembangunan yang berlandaskan iman dan takwa kepada Allah SWT.

Berikut ini prinsip akhlak menurut islam:

1. Prinsip Tauhid Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan.

Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu’amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

2. ‘Adl Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum di bumi agar terciptanya hidup yang sejahtera, Islam sangat mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa

pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.

3. Nubuwwah Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia untuk mengetahui bagaimana kehidupan jalan yang baik dan benar, dan mengajarkan islam agar selalu ingat terhadap maha esa agar hidup memiliki rasa kepercayaan terhadap Allah SWT. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Sifat sifat yang harus dimiliki para pelaku bisnis agar terciptanya pembangunan menurut islam adalah Sidiq (benar, jujur), amanah ( tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

#### 4. Khalifah

Dalam Islam, pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Tugas utamanya adalah memastikan perekonomian berfungsi sesuai dengan hukum syariah dan bebas dari pelanggaran hak asasi manusia. Semua ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan Syariah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan menjaga keimanan, jiwa, akal, kehormatan, kebahagiaan manusia, dan kekayaan manusia. Khilafah atau pengemban dakwah Allah pada umumnya berlaku bagi seluruh umat manusia dan tidak ada keistimewaan khusus bagi orang atau bangsa tertentu sejauh menyangkut tugas khilafah. Namun, hal ini tidak berarti bahwa masyarakat selalu mempunyai atau harus mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan

ruang. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah peluang berbeda yang dapat dimanfaatkan oleh setiap individu bergantung pada kemampuan dan kesuksesan mereka. Manusia diciptakan Tuhan dengan kemampuan yang berbeda-beda agar dapat hidup bersama, bekerja sama, dan saling bertoleransi terhadap kemampuan yang dimilikinya. Masing-masing membutuhkan seseorang yang menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap satu sama lain untuk mengembangkan persahabatan.

5 Ma'ad (Hasil) Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang paling khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: "Dunia adalah ladang akhirat". Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa dari akhirat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini tergolong studi kepustakaan berdasarkan jenis penelitiannya. Tujuan metode penelitian ini adalah mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan sumber jurnal ekonomi Islam dan artikel ekonomi Islam dan bahan sastra lain yang relevan dengan pembahasan (Hadi, Sutrisno, 2004). Pendekatan yang dipilih adalah analisis deskriptif dengan kajian studi kasus. Merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menguraikan secara objektif dan sistematis informasi dan fakta yang berkaitan dengan topik pembahasan dari berbagai sumber guna mencapai pemahaman dan interpretasi terhadap informasi yang dianalisis (Kaelan, M. S., 2005). Peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan dan studi dokumenter untuk memperoleh data. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif dan konkrit mengenai akhlak dasar pengembangan ekonomi islam KH. Ma'ruf Amin dan Adiwarmanto Azwar Karim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konsep akhlak dasar yang diperkenalkannya, KH. Ma'ruf Amin berpijak pada tiga prinsip yaitu keadilan, keumatan dan kedaulatan. Dengan landaskan dari tiga prinsip kesatuannya dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat. Konsep keadilan didasarkan pada nilai-nilai agama, keadilan sosial, dan ekonomi moral dengan semangat kemanusiaan. Perekonomian nasional juga dilandasi oleh semangat kerakyatan (demokrasi ekonomi) dan arahnya ditujukan kepada rakyat. Prinsip ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada kemitraan, solidaritas, dan musyawarah. Terakhir, kemandirian atau kedaulatan ekonomi, yang meliputi semangat nasionalisme ekonomi dengan menjunjung tinggi prinsip kemandirian dan memberdayakan yang lemah (Panggabean, Sahala, and Anwar Abbas, 2019).

### A. Ekonomi berkeadilan Keadilan

adalah prinsip pertama pembangunan ekonomi KH. Ma'ruf Amin. Mengutip Bung Hatta, keadilan merupakan kesetaraan dan hilangnya kezaliman (Sasono, Adi, 2008). Dalam artian setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara. Namun, hal ini berbeda dengan paham liberalisme yang memperlakukan kaya dan miskin secara setara, yang cenderung digeneralisasikan terlepas dari konteks perbedaan sosial. Pentingnya keadilan saja tidak cukup untuk menjaga kesetaraan. Sebab yang lemah juga perlu dilindungi agar tidak diintimidasi orang yang lebih kuat.

### B. Ekonomi keumatan Ketika masyarakat miskin produktif (usaha mikro)

menerima modal dan dukungan, mereka dapat memperkuat perekonomian. Dengan latar belakang ini, sosio-ekonomi adalah ekonomi kerakyatan yang berpusat pada manusia. Perkembangan dan kemajuan membutuhkan dorongan. Kunci keberhasilan China dalam membangun ekonominya adalah membangunnya dari nol. Dia mampu keluar dari bayang-bayang pengusaha Soviet dan bertekad untuk membangun ekonomi (pertanian) (Mubyarto, 1998).

Semangat ekonomi kerakyatan diwujudkan dengan membangun perekonomian dari bawah ke atas. Berbeda dengan kapitalis yang mendapat

untung dari prinsip persaingan, ekonomi pada dasarnya memilih untung dengan bekerja sama dan memakmurkan. Selain itu, keadilan adalah tujuan ekonomi publik. Pertumbuhan yang mampu dicapai lebih eksponensial dan sustainable (berkelanjutan). Hal ini jelas berbeda ketika melakukan pembangunan ekonomi dengan trickle-down effect yang bertitik tumpu pada konglomerat (Panggabean, Sahala, and Anwar Abbas, 2019).

C. Ekonomi berkemandirian Kontribusi usaha kecil dan menengah

terhadap perekonomian nasional sangat besar, bahkan dapat dikatakan sebagai penggerak perekonomian nasional. Ada beberapa alasan mengapa UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Pertama, UMKM didominasi oleh manusia. Kedua, diperintah oleh rakyat, sehingga tingkat keadilannya sangat tinggi. Ketiga, memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi. Karena itu Marfu Amin selalu menekankan pentingnya berpihak pada ekonomi nasional dalam konsepnya (Panggabean, Sahala, and Anwar Abbas, 2019)

Berdasarkan data di atas secara ringkas pemikiran pembangunan ekonomi KH. Ma'ruf Amin mengenai pembangunan ekonomi secara singkat terfokus pada tiga gagasan utama: ekonomi berkeadilan, ekonomi kerakyatan, dan ekonomi kemandirian. Dalam konsep keadilan ekonomi, Pancasila berada pada sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dan konsisten dengan salah satu kurikulum.

Selain itu, cita-cita ekonomi keadilan adalah untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kemiskinan agar menjamin terjadinya pembangunan ekonomi yang setara, dan ketika disajikan dalam keadaan kurva saat ini, kurva tersebut akan menjadi kurva piramidal ke arah kurva belah ketupat, mengarah ke pegunungan wayang. juga akan Dalam keadilan ekonomi

Menurut Adiwarman Karim, ekonomi Islam diibaratkan satu bangunan yang terdiri atas landasan, tiang, dan atap (Karim, Adiwarman A., 2001). Adhiwarman mengakui hal ini dan menawarkan pemahaman ekonomi Islam yang dibangun di atas nilai-nilai Islam universal. Nilai-nilai yang dimaksud adalah tauhid (kesatuan), 'adl (keadilan), khilafah (pemerintahan), nubuwah (nubuatan), dan ma'ad (kembali). Singkatnya, keterkaitan prinsip-

prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Adhiwarman menawarkan pemahaman ekonomi Islam yang dibangun di atas nilai-nilai Islam universal. Nilai-nilai yang dia maksud adalah tauhid (kesatuan), 'adl (keadilan), khilafah (pemerintahan), nubuwwah (nubuatan), dan ma'ad (return).

Multiple ownership (kepemilikan multi jenis) Kepemilikan jamak muncul dari prinsip monoteistik bahwa manusia, sebagai penjaga bumi, diberikan hak dan tanggung jawab yang sama untuk mengelola sumber daya yang tersedia guna meningkatkan dan menciptakan pembangunan berkelanjutan. Namun, karena kebebasan manusia untuk mengeksploitasi sumber daya terbatas, maka tujuan bersama untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata (Kembali Ma'ad) dapat dipertahankan baik dalam bidang sosial maupun keadilan sosial. Di sisi lain, prinsip kebebasan bertindak, seperti yang dipraktikkan pada masa Nabi, memotivasi para pelaku ekonomi untuk selalu menjamin pembangunan yang kreatif, baik dalam kapasitas individu maupun dalam kapasitas pemerintah sebagai otoritas pengatur .

Selain prinsip di atas, agar terciptanya sistem ekonomi Islam juga memerlukan tatanan normatif atau juga bisa disebut hukum yang berfungsi sebagai payung (atap) dan menjamin keberlangsungannya. Sistem norma atau hukum ini oleh Adhiwarman Anwar Karim disebut etika ekonomi Islam. Agar terjalannya sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan dengan prinsip dasar dari Islam sendiri dalam membangun perekonomian atas dasar keadilan, kesejahteraan maupun pembangunan ekonomi yang setara.

### **Persamaan dan Perbedaan Akhlak Dasar Pembangunan Ekonomi Islam Menurut KH. Ma'ruf Amin dan Adhiwarman Azwar Karim**

#### **1. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan Pokok pikiran**

Menurut KH. Ma'ruf Amin dan Adhiwarman Azwar Karim berpijak pada pandangannya bahwa mewujudkan masyarakat yang berkeadilan adalah cita-cita nasional. Keduanya berkeyakinan bahwa tujuan pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tapi KH. Ma'ruf Amin memisahkan keduanya. KH. Ma'ruf Amin tidak hanya bercita-cita pada keadilan, tetapi juga memandang keadilan sebagai suatu

konsep dalam melakukan pembangunan, yang ia sebut dengan konsep ekonomi berkeadilan.

## 2. Pemerataan sosial menjadi tolak ukur dalam pembangunan

KH.Ma'ruf Amin dan Adiwarmarman Azwar Karim sependapat bahwa pemerataan kekayaan sangat penting dan merupakan salah satu norma masyarakat. Kedua, jika dahulu jumlah penduduk miskin banyak, atau jumlah penduduk miskin berkurang sampai nol atau (sedikit), maka pembangunan nasional dapat dikatakan dapat dicapai dengan meratakan struktur sosial. Mereka juga sepakat bahwa Islam sangat ketat mengenai keadilan sehingga hal ini harus dilakukan untuk mengurangi ketegangan antara si kaya dan si miskin. Namun, jalan menuju keadilan berbeda dari kedua sudut pandang tersebut. Adiwarmarman Azwar Karim percaya bahwa Islam menghormati dan melindungi hak-hak pembeli dan penjual dalam menentukan harga, memberikan keadilan, dan hak untuk menciptakan persaingan yang sehat dan monopoli. Meskipun peraturan persaingan usaha ini dimaksudkan untuk memungkinkan pemerintah melindungi hak-hak orang lain tanpa campur tangan, pada kenyataannya pemerintah melindungi kepentingan warga negaranya, dan kedua hal tersebut tidak perlu didamaikan. KH.Di sisi lain, Malaf Amindi berpendapat bahwa untuk mencapai keadilan diperlukan pemikiran ekonomi untuk rakyat (rakyat).

## 3. Peran negara dalam mendukung pembangunan ekonomi

Menurut KH. Ma'ruf Amin dan Adiwarmarman Azwar Karim, peran negara (pemerintah) sangat penting dalam mencapai pembangunan ekonomi. Kebijakan yang diumumkan oleh negara nantinya akan mempengaruhi kemudahan dan kesulitan pencapaian pembangunan ekonomi. Namun, dalam peran lain yang harus ditekankan oleh negara, kedua tokoh ini memiliki pandangan yang berbeda dalam menjelaskan kebijakan dalam mendukung pembangunan ekonomi.

KH. Ma'ruf Amin fokus pada penguatan dukungan pembangunan dan pemeliharaan kelembagaan perekonomian, peningkatan pembiayaan, kualitas dan kapasitas, serta perluasan akses pasar (ekonomi) melalui demokrasi ekonomi. Di sisi lain, Azwar Karim dari Adiwarmarman menekankan peran negara dalam kebijakan moneter. Kebijakan ini mengacu pada kebijakan Pak Nabi dan Pak

Kulafaul Rasyiddin yang dilaksanakan tanpa kepentingan. Perekonomian pada masa Nabi dan Kulafaul Rasyiddin adalah perekonomian yang progresif dibandingkan perekonomian yang terbelakang, meskipun pada saat itu hanya menerima sistem barter. Dan perekonomian pada saat itu didasarkan pada perdagangan uang sebagai alat tukar, bukan sumber daya alam.

#### 4. Moral sebagai pembangunan ekonomi

Menurut KH. Ma'ruf Amin dan Adiwalman Azwar Karim sangat diperlukan secara akhklak moral untuk mencapai pembangunan ekonomi. Keduanya sepakat bahwa jika individu ingin berkembang secara adil, mereka harus memperkuat moralnya (spirit religius/tauhid) untuk menghindari perilaku moral hazard. Mereka yang berkepentingan percaya bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan dan bahwa manusia hanyalah wali. Semua kegiatan ekonomi memiliki sistem akuntabilitas. Untuk lebih mempermudah dan memperjelas dalam memahami pemikiran pembangunan ekonomi KH. Ma'ruf Amin dan Adiwarman Azwar Karim, maka penulis menyajikan perbandingan pemikiran kedua tokoh dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam KH. Ma'ruf Amin dan Adiwarman Azwar Karim.**

Keterangan	KH. Ma'ruf Amin	Adiwarman Azwar Karim
Objek dan subjek pembangunan	Manusia, lingkungan dan spiritual	Manusia, lingkungan dan spiritual
Landasan pembangunan	Moral, kemanusiaan, keadilan sosial, kemitraan, persatuan, demokrasi dan kemandirian.	tauhid, keadilan, pemerintahan, nubuwah, return.
Indikator pembangunan	Pemerataan kekayaan, padat karya, budaya menabung dan investasi serta ekspor lebih besar dari impor	intervensi khilafah (pemerintah), keadilan sosial, kebijakan moneter
Tujuan pembangunan	Kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia	Kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Tidak meratanya pembangunan ekonomi menjadi pendorong manusia bersaing untuk memperoleh laba, padahal Islam menganjurkan manusia mengabdikan kepada Allah SWT dengan berlandaskan iman dan takwa. KH. Ma'ruf Amin memperkenalkan tiga prinsip dasar perekonomian, yaitu keadilan, keumatan, dan kedaulatan. Artinya setiap orang harus diperlakukan secara adil dan keadilan penting dijaga dan dilindungi agar tidak terjadi intimidasi antara yang lemah dan kuat. Serta memberikan dorongan dan kedaulatan berupa modal dan dukungan usaha kecil menengah kepada yang produktif untuk membangun dan menggerakkan perekonomian nasional. Sedangkan menurut Al-Fasi prinsip Ekonomi Islam yakni tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Artinya dengan melibatkan Allah dalam segala aktivitas, tidak merugikan orang lain dan meneladani sifat Rasul dalam melakukan aktivitas perekonomian, melaksanakan amanat sebagai khalifah (pemimpin) di dunia yang sejalan dengan menjaga perekonomian yang selaras dengan ketentuan Islam, serta tidak melupakan akhirat yang mana itu merupakan tujuan utama manusia di muka bumi.

Peran negara tentu sangat besar dalam pembangunan ekonomi yang selaras dengan syariat Islam, maka dari itu penting memilih pemimpin yang baik. Individu perlu memberikan seleksi kepada calon – calon yang akan memimpin apakah sudah sesuai dengan nilai - nilai keislaman. Juga penanaman nilai Islam dalam diri sejak dini melalui pendidikan, karena manusia merupakan khalifah di bumi ini, artinya manusia memiliki amanah untuk memelihara, memanfaatkan, atau mengoptimalkan segala anggota badan, alat-alat potensial (termasuk indera, akal dan qalbu) atau potensi-potensi dasar manusia, guna menegakkan keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan hidup.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan artikel ini. Artikel ini ditulis untuk memenuhi persyaratan evaluasi tengah semester semester kedua, mata kuliah

Pendidikan Agama. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akan cukup sulit bagi kami untuk menyelesaikan artikel ilmiah ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Gt. Muhammad Iramna Husin, M.Pd.I, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama.
2. Ibu Noor Ainah, S.Th.I, M.Pd., selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama.
3. Kepada Aisyah Humaira, Marisa Tri Setia, dan Najwa Azizah selaku penulis. Kami selaku penulis menyadari dalam penulisan artikel ini masih terdapat Pendidikan Agama.
3. Kepada Aisyah Humaira, Marisa Tri Setia, dan Najwa Azizah selaku penulis.

Kami penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan artikel ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan artikel ini sangat kami harapkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan semoga artikel yang kami tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

#### Daftar Pustaka

Ahyani, H. and Nurhasanah, E. 2020. PERAN STRATEGI POLITIK ISLAM TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. 3, 1 (Jun. 2020), 22-23. DOI:<https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.185>.

Aisyah, L., dan Achiria, S. (2019). Usaha Bisnis E-commerce Perspektif Ekonomi Islam (studi pada bisnis @lisdasasirangan). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 187–200. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i2.507>

Hariyadi, A., dan Misidawati, D. N. (2020). Pengenalan Pendidikan Ekonomi Islam Kepada Generasi Muda: Upaya Peningkatan Mutu Ekonomi Masa Depan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(3), 217-224.

Iqbal, M. (2019). Ayat-Ayat Al-Qur'an dan hadis-Hadis Tematik Tentang Uang Dan Pembiayaan. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 272-292. <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/view/292/288>

Mth, A. (2003). Konsep Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 10. <https://journal.uji.ac.id/JHI/article/view/2621>

Muhit, M., Darsono, M. M., dan Syarif, N. (2023). INTERKONEKSI NILAI FILSAFAT SYARIAH DAN FILSAFAT EKONOMI SYARIAH. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(001), 78–83. <https://doi.org/10.30868/ad.v6i001.3594>

Wahidin, A. (2018). PRINSIP SALING RELA DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM (Tafsir Analitis Surat An-Nisaâ€™ [4] Ayat 29). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 110–134. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.352>

Wahid, K., Mutafarida, B., dan Andriani. (2023). Analisis Komparatif Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam KH. Ma’ruf Amin Dan Adiwarmarman Azwar Karim. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 2(1), 50–63. <https://doi.org/10.58355/organize.v2i1.6>